

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER TAHUN 2023

Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli

Gunungsitoli - Sumatera Utara 22814

Telp. 0639 21343 Fax. 0639 21343

e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli

Telp. 0639 21343 Fax. 0639 21343

Gunungsitoli - Sumatera Utara 22814

e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gunungsitoli, 31 Desember 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,

ERWIN HAREFA, S.H.
NIP. 19721221 199303 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca.....	15
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
Daftar dan Lampiran	54
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	55
Daftar Hibah Langsung.....	58

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli Gunungsitoli - Sumatera Utara 22814

Telp. 0639 21343 Fax. 0639 21343 e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Gunungsitoli, 31 Desember 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,

ERWIN HAREFA, S.H.

NIP. 19721221 199303 1 002

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai pada Bulan Desember TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 5,334,620 atau mencapai 177 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 3.010.000.

Realisasi Belanja Negara sampai pada Bulan Desember TA 2023 adalah sebesar Rp 5,395,381,988 atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.621.081.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 51,288,901,234, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 1,197,500; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 51,287,703,734; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 542,867 dan Rp 51,288,358,367.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 5,334,620, sedangkan

jumlah beban adalah sebesar Rp. 5,807,570,489, sehingga terdapat surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (5,802,235,869). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0 dan surplus/(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp (5,802,235,869).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp51,288,358,367 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (5,802,235,869) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 14,467,311, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 5,452,745,368, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 51,288,358,367.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3,010,000	5,334,620	177	4,165,459
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		3,010,000	5,334,620	177	4,165,459
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.658.016.000	3,453,216,61	94	3,399,512,179
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.831.975.000	1,811,375,377	99	1,867,689,137
3.	Belanja Modal	B.2.3.	131.090.000	130,790,000	100	49.205.600
	Jumlah Belanja Negara		5.621.081.000	5,395,381,988	96	5,316,406,916

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C. 1.	1,197,500	1.045.000
Jumlah Aset Lancar		1,197,500	1.045.000
Aset Tetap			
Tanah	C. 2.	42,744,912,000	42,744,912,000
Peralatan dan Mesin	C. 3.	42,744,912,000	42,744,912,000
Gedung dan Bangunan	C. 4.	3,154,647,343	3,154,647,343
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 5.	0	126.591.000
Aset Tetap Lainnya	C. 6.	3.380.440	3.380.440
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 7.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 8.	(4,704,093,049)	(4.169.838.862)
Jumlah Aset Tetap		51,287,703,734	51.623.043.421
Aset tak Berwujud	C. 9.	4.950.000	4.950.000
Aset Lain-Lain	C. 10.	12.500.000	12.500.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C. 11.	(17.450.000)	(17.450.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		51,288,901,234	51.624.088.421
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak ketiga	C. 12.	542,867	706.864
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		542,867	706.864
Jumlah Kewajiban		542,867	706.864
EKUITAS			

Ekuitas	C. 13.	51,288,358,367	51.623.381.557
Jumlah Ekuitas Dana		51,288,358,367	51.623.381.557
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		51.154.061.812	51.624.088.421

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
LAPORAN OPERASIONAL
31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5,334,620	5,334,620
Jumlah Pendapatan		5,334,620	5,334,620
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3,452,664,001	3,400,064,789
Beban Persediaan	D. 3	52,409,500	71,021,808
Beban Barang dan Jasa	D. 4	899,637,851	931,816,270
Beban Pemeliharaan	D. 5	664,104,147	667,487,858
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	195,459,992	189,707,736
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	543,294,998	511,282,179
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10		
Jumlah Beban		5,807,570,489	5,771,380,640
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5,802,235,869)	(5,768,340,445)
Kegiatan Non Operasional			
D. 11			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	1,125,264
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(5,802,235,869)	(5,767,215,181)
Pos Luar Biasa	D. 12	0	0

Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(5,802,235,869)	(5,767,215,181)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
Ekuitas Awal	E. 1	51.623.381.557	51.807.928.031
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(5,802,235,869)	(5,767,215,181)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	14,467,311	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	14,467,311	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	5,452,745,368	5,582,668,707
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(335,023,190)	(184,546,474)
Ekuitas Akhir		51,288,358,367	51,623,381,557

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Visi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
5. Menciptakan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme secara handal dan professional di bidang tugasnya masing-masing

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sitoli melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Ketenagaan mencakup:
 - a) Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi

- b) Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c) Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d) Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi
2. Sarana mencakup :
- a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
- a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
- a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, Informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja

yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja antara lain:

No.	Uraian	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi
1.	Belanja Pegawai	3.658.016.000	3.658.016.000
2.	Belanja Barang	1.831.975.000	1.831.975.000
3.	Belanja Modal	1.500.000	131.090.000
Total Belanja		5.491.491.000	5.621.081.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami Kenaikan Nilai sebesar 1,169,161 atau 22 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya Penambahan jumlah hakim sehingga Sewa Rumah Dinas Bertambah

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2023 Dan 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,334,620	4,165,459	1,169,161	22
2.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		5,334,620	4,165,459	1,169,161	22

B.1. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
5,395,381,988

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp. 5,395,381,988 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 96% dari

anggaran senilai Rp. 5.621.081.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.658.016.000	3,453,216,61	94
Belanja Barang	1.831.975.000	1,811,375,377	99
Belanja Modal	131.090.000	130,790,000	100
Total Belanja Bruto	5.621.081.000	5,395,381,988	96
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	5.621.081.000	5,395,381,988	96

Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar Rp. 225,699,021 atau sebesar 4,02 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penambahan pada pagu revisi sebesar Rp. 129.590.000 pada Belanja Modal Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3,453,216,611	3,399,512,179	53,704,432	1.56%
Belanja Barang	1,811,375,377	1,867,689,137	-56,313,760	-3.11%
Belanja Modal	130,790,000	49,205,600	81,584,400	62.38%
Total Belanja	5,395,381,988	4.086.233.726	1,309,148,262	24.26%

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
3,453,216,611*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp 3,453,216,611 dan Rp. 3,399,512,179.

Realisasi Belanja Pegawai Desember TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 53,704,432 atau sebesar 1,56% persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai Desember TA 2022.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,358,650,540	1,303,825,440	54,825,100	4.04%
Beban Pembulatan Gaji PNS	22,844	23,824	-980	-4.29%
Beban Tunj Suami/Istri PNS	86,154,880	90,298,380	-4,143,500	-4.81%
Beban Tunj Anak PNS	33,029,042	32,077,736	951,306	2.88%
Beban Tunj Struktural PNS	28,840,000	28,840,000	0	0.00%
Beban Tunj Fungsional PNS	1,348,590,000	1,329,730,000	18,860,000	1.40%
Beban Tunj PPh PNS	167,729,077	167,126,332	602,745	0.36%
Beban Tunj Beras PNS	79,734,420	80,313,780	-579,360	-0.73%
Beban Uang Makan PNS	228,526,000	241,242,000	-12,716,000	-5.56%
Beban Tunjangan Umum PNS	20,690,000	22,455,000	-1,765,000	-8.53%
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	101,250,000	103,950,000	-2,700,000	-2.67%
Total Belanja Brutto	3,453,216,803	3,399,882,492	53,334,311	1.54%
Pengembalian Belanja	(192)	(370,313)	370,121	
Total Belanja Netto	3,453,216,611	3,399,512,179	53,704,432	1.56%

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp
1,811,375,377

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 1,811,375,377 dan Rp 1,867,689,137.

Realisasi Belanja Barang Desember TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. -56,313,760 atau sebesar -3,11 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Desember TA 2022.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	875,922,530	830.719.230	45,203,300	5.16%
Belanja Barang Persediaan	52,562,000	71.983.808	-19,421,808	-36.95%
Belanja Jasa	15,454,283	107.640.505	-92,186,222	-596.51%
Belanja Pemeliharaan	664,104,147	667.487.858	-3,383,711	-0.51%
Belanja Perjalanan Dinas	195,459,992	189.707.736	5,752,256	2.94%
Belanja Barang Non Operasional	7.872.425	150.000	7,722,425	98.09%
Total Belanja Brutto	1,811,375,377	1.867.689.137	-56,313,760	-3.11%
Pengembalian Belanja	-	0	-	0%
Total Belanja Netto	1,811,375,377	1.867.689.137	-56,313,760	-3.11%

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
: Rp
130,790,000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp 130,790,000 dan Rp. 49,205,600. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 Belanja Modal telah dilaksanakan.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	130,790,000	49.205.600	81,584,760	62,38%
Total Belanja Brutto	130,790,000	49.205.600	81,584,760	62,38%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	130,790,000	49.205.600	81,584,760	62,38%

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp.
52,562,000

Aset Lancar

Persediaan:
Rp 52,562,000

C.1. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 52,562,000 dan Rp. 56,989,000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	52,562,000	56,989,000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0

10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		52,562,000	56,989,000

Aset Tetap:
Rp.
51.890.540.492

Aset Tetap

C.2.Tanah

Tanah:
Rp
42.744.9
12.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 42.744.912.000 dan Rp. 42.744.912.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Desember 2022	42.744.912.000	
Mutasi Tambah		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	
Mutasi Kurang		
	0	
Saldo per 31 Desember 2023	42.744.912.000	
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0	
Nilai Buku 31 Desember 2022		42.744.912.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1.	1.008	Pulau - Pulau Batu Tello	251.250.000
2.	794	Jl. IR. Soekarno G.Sitoli	5.859.688.000
3.	726	JL. GOMO G. SITOLI	5.593.845.000
4.	1.140	JL. BARU HILINAA	723.056.000
5.	3.822	JL. PANCASILA NO. 12 G.SITOLI	29.291.061.000
6.	1.000	JL. DIPONEGORO T. DALAM	615.000.000
7.	1.250	LAHEWA	411.012.000
Jumlah			42.744.912.000

C.3.Peralatan dan Mesin

Peralatan
dan Mesin
: Rp
3,154,647,
343

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 3,154,647,343 dan Rp. 2.955.732.843.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	2.955.732.843
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	40.900.000
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 31 Desember 2023	3,154,647,343
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(2,621,514,122)
Nilai Buku 31 Desember 2023	533,133,221

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4.Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 9.962.266.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.962.266.000 dan Rp. 9.962.266.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	9.962.266.000
Mutasi Tambah	
Selisih Revaluasi	0
Mutasi Kurang	
...	...
Saldo per 31 Desember 2023	9.962.266.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(1.702.731.436)
Nilai Buku 31 Desember 2023	8.414.951.438

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5.Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 126.591.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 126.591.000 dan Rp. 126.591.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	126.591.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 31 Desember 2022	126.591.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(69.578.680)
Nilai Buku 31 Desember 2022	57.012.320

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan

ini.

C.6.Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya:
Rp
3.380.440

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.380.440 dan Rp. 3.380.440.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	3.380.440
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 31 Desember 2022	3.380.440
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(0)
Nilai Buku 31 Desember 2022	3.380.440

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7.Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan :
Rp
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap :
Rp
(4.174.801.362)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp (4,716,593,049) dan Rp (4.169.838.862).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3,154,647,343	(2,621,514,122)	533,133,221
2	Gedung dan Bangunan	10,088,857,000	(2,082,578,927)	8,006,278,073
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	72,550,948	0
4	Aset Tetap Lainnya	3.380.440	0	3.380.440
	Jumlah	13,243,504,343	-4,704,093,049	8,539,411,294

Aset
Lainnya:
Rp.
51.890.54
0.492

Aset Lainnya

C.9.Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp
4.950.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.950.000 dan Rp. 4.950.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi transaksi ATB per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	4.950.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 31 Desember 2022	4.950.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(4.950.000)
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

C.10. Aset Lain-lain

Aset Lain-
lain :
Rp
12.500.000

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.500.000 dan Rp. 12.500.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi transaksi ATB per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Desember 2022	12.500.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 31 Desember 2022	12.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(12.500.000)
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

Aset lain-lain pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berupa Komputer yang sudah tidak digunakan lagi untuk menunjang operasional kantor.

C.11. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp
(17.450.000)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp (17.450.000) dan Rp. (17.450.000) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Aset tak Berwujud	4.950.000	4.950.000
2	Aset Lain-lain	12.500.000	12.500.000
	Nilai perolehan Aset Lainnya	17.450.000	17.450.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.450.000)	(17.450.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.12. Kewajiban

Utang
kepada
Pihak
Ketiga:
Rp.
282.638.
454

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 542,867 dan Rp 706.864. Utang kepada Pihak ketiga adalah kewajiban yang belum dibayarkan yang timbul akibat telah diterimanya hak atas barang.

C.13. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
51,407,1
90,352*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 51,288,358,367 dan Rp 51,623,381,557. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2023 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp. (335,023,190) atau sebesar 0,65 persen dari nilai per 31 Desember 2022. Jumlah nilai Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 51,288,358,367, sedangkan per 31 Desember TA 2022 tercatat sebesar Rp. 51,623,381,557.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbP : Rp -
4.158.850*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp -4.158.850 dan Rp -2.484.425 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik (turun) %
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,334,620	3,040,195	43,01%
2.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Total Pendapatan		5,334,620	3,040,195	43,01%

D.2. Beban Pegawai

*Beban
Pegawai : Rp
2.904.478.734*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3,224,138,193 dan Rp 3.399.512.179. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik(turun)%
1.	Beban Gaji	1,358,184,318.00	1.303.682.289	4.01%
2.	Beban Tunjangan-tunjangan	1,865,953,875.00	2.095.829.890	-12.32%
3.	Beban Honorarium dan Vakansi	0	0	0
4.	Beban Lembur	0	0	0
Total		3,224,138,193	3.399.512.179	-5.44%

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan
: Rp
22.234.500

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 52.409.500 dan Rp 71.021.808. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik (turun) %
1.	Beban Persediaan Konsumsi	52.409.500	71.021.808	-35,51%
2.	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0
3.	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		52.409.500	71.021.808	-35,51%

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban
Barang dan
Jasa : Rp
659.296.277

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 891,765,426 dan Rp. 919,512,016. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	803,203,680	722.725.009	10.02%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,529,200	19.074.221	-65.44%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56,436,000	39.000.000	30.90%
Beban Barang Operasional Lainnya	5,183,500	49.920.000	-863.06%
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Langganan Listrik	-	150.000	-
Beban Langganan Telepon	894,528	87.201.030	-9648.27%
Beban Langganan Air	718,518	849.001	-18.16%
Beban Sewa	13,800,000	742.755	94.62%
Total Beban Barang dan Jasa	891,765,426	919,512,016	-3.11%

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan:
Rp
4.86.689.096

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 664,104,147 dan Rp 667,487,858. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	335,528,100	314.823.900	6.17%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	123,028,091	146.217.000	-18.85%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205,547,956	206.446.958	-0.44%
Total Beban Pemeliharaan	664,104,147	667,487,858	-0.51%

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp
167,044,245

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 195,459,992 dan Rp. 189.707.736. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	195,459,992	189.707.736	2,94%
Total Beban Perjalanan Dinas	195,459,992	189.707.736	2,94%

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi :
Rp
238.822.608*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 275,072,351 dan Rp. 238.822.608. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	221,531,144	80.433.466	63.69%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	321,763,854	155.416.874	51.70%
Beban Penyusutan Irigasi	0	481.268	-100,00%
Beban Penyusutan Jaringan	0	2.491.000	-100,00%
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	275,072,351	238.822.608	56.04%

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih :
Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban
Lain-Lain :
Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang

timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp 0 Jumlah Beban Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Surplus(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0	0	(0)
Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	(0)
Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp 0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Pendapatan PNPB	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 51.623.381.557 dan Rp. 51.807.928.031.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (5,802,235,869) dan Rp. (5,767,215,181) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 14,467,311 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 .

E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. (14,467,311) dan Rp 0. Koreksi ini disebabkan oleh beberapa transaksi koreksi nilai aset tetap non revaluasi dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tanggal Jurnal	Deskripsi	Nilai
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	20-JUL-23	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	253.294.768
Koreksi Pencatatan	20-JUL-23	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen	460.815.000
Koreksi Pencatatan	20-JUL-23	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.210.015.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	20-JUL-23	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	(1.670.830.000)
Koreksi Pencatatan	20-JUL-23	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen	(66.696.905)
Koreksi Pencatatan	20-JUL-23	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen	(147.890.721)
Koreksi Pencatatan	21-SEP-23	Koreksi Pencatatan Jaringan Telepon Diatas Tanah Lainnya	99.640.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	21-SEP-23	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	15.105.242
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	21-SEP-23	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	(99.640.000)
Reklasifikasi Masuk	21-SEP-23	Reklasifikasi Masuk Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	(1.022.695)
Koreksi Pencatatan	21-SEP-23	Koreksi Pencatatan Jaringan Telepon Diatas Tanah Lainnya	(67.257.000)
TOTAL			(14.467.311)

E.3. 5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2023**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,452,745,368 dan Rp. 5.577.706.207.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2023**
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(5,334,620)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,395,381,988
Transfer Masuk	62,698,000
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	5,452,745,368

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (5,334,620) sedangkan DKEL sebesar Rp. 5,395,381,988.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan transaksi atas pencatatan transfer Masuk/Keluar KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pada periode hingga 31 Desember 2023, Transfer Masuk sebesar Rp. 62,698,000, sedangkan Transfer Keluar Rp.0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 51,288,358,367 dan Rp 51,623,381,557.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tidak ada transaksi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia A/C 653240986961000 a.n. BPG 007 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 098696 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 29.982.375.
2. Bank Rakyat Indonesia A/C 654450991981000 a.n. BPG 007 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 099198 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.980.500.
3. Bank Rakyat Indonesia A/C 0176.01.000420.30.6 a.n. RPL 007 PN GSITOLI UTK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.420.785.185.
4. Bank Rakyat Indonesia A/C 0176.01.001684.30.1 a.n. BPN 007 PN GUNUNGSITOLI yang digunakan sebagai Penampung PNBK dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.032.000.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut : ada Revisi DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM : Tidak terdapat Ralat SPM

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2022	2023	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2023
A.	Peralatan dan Mesin		2.984.699.493	2.099.651.613	80.433.466	2.310.569.049	529.890.828
1.	Alat Bantu	7	238.722.000				
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	434.264.000				
3.	Alat Kantor	5	299.248.766				
4.	Alat Rumah Tangga	5	905.986.007				
5.	Alat Studio	5	101.032.820				
6.	Alat Komunikasi	5	59.829.100				
7.	Alat Kedokteran	5	56.300.000				
8.	Unit Alat Laboratorium	8	9.525.000				
9.	Komputer Unit	4	674.968.310				
10.	Peralatan Komputer	4	204.823.490				
B.	Gedung dan Bangunan		9.962.266.000	1.236.480.814	155.416.874	1.547.314.562	8.414.951.438
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	7.087.118.000				

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.875.148.000				
C.	Irigasi		26.951.000	3.850.144	481.268	4.812.680	4.331.412
	1. Bangunan Air Bersih/air Baku	40	26.951.000				
D.	Jaringan		99.640.000	59.784.000	2.491.000	64.766.000	62.275.000
	1. Jaringan Telepon	20	99.640.000				
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	1. Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
	2. Alat Kantor	5					
	3. Alat Rumah Tangga	5					
	4. Komputer Unit	4					
	5. Peralatan Komputer	4	12.500.000			12.500.000	0
	6. Bangunan Gedung Tempat Kerja	50					
	Jumlah		13.073.556.493	3.399.766.571	238.822.608	3.927.462.291	9.011.448.678

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
	NIHIL						
			Jumlah :				